

PEMBERITAAN BATU BARA DAN ENERGI TERBARUKAN DI INDONESIA

Oleh Ari Ulandari dan Cherika Hardjakusumah
Climate Tracker Fellow



Anak-anak bermain di tepi pantai dekat pembangkit listrik tenaga batu bara di Jepara, provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Foto oleh Kemal Jufri/Greenpeace

Sampul: Kapal tongkang batubara menyusuri Sungai Mahakam di Samarinda, provinsi Kalimantan Timur, Borneo, Indonesia. Kalimantan Timur adalah wilayah ekspor batu bara paling penting di Indonesia. Foto oleh Kemal Jufri/Greenpeace

RINGKASAN EKSEKUTIF

Asia Tenggara merupakan wilayah yang berkembang pesat, dan keputusan energinya sangat penting bagi upaya global pada dekade mendatang untuk mengurangi bahan bakar fosil penghasil karbon. Namun, sedikit yang diketahui tentang narasi media tertentu yang memicu debat nasional tentang transisi energi di setiap negara. Bagi para pemangku kepentingan yang ingin memengaruhi narasi tersebut dan meningkatkan kualitas pemberitaan energi, pelajaran dari masa lalu sangat penting demi keberhasilan di masa yang akan datang. Kesenjangan pengetahuan inilah yang ingin dilengkapi oleh Climate Tracker dan Stanley Center for Peace and Security melalui analisis liputan media terkait energi di lima negara di Asia Tenggara. Laporan tentang Indonesia ini adalah yang keempat dari serangkaian laporan yang disiapkan oleh Stanley Center dan dibuat oleh Climate Tracker, yang akan diterbitkan bersama sebagai bagian dari *Fueling the Tiger Cubs: How Southeast Asia's Media Is Covering Coal's Last Frontier (Bagaimana Media Asia Tenggara Menghadapi Fase Perjalanan Terakhir Batu Bara)*, sebuah analisis media multinegara yang dipimpin oleh jurnalis muda dari Filipina, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Setiap negara Asia Tenggara dalam penelitian kami memiliki lanskap media yang unik dengan tantangan dan peluang yang berbeda untuk pemberitaan energi.

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar kelima di dunia dan terbesar di ASEAN. Dengan batasan yang relatif sedikit **dalam mendirikan outlet media**, Indonesia memiliki pasar dan industri media terbesar di kawasan ini. Ada lebih dari **47.000 outlet berbeda di seluruh negeri pada tahun 2017**. Indonesia sedang mengalami **konvergensi media** yang cepat, namun demikian; 12 konglomerasi media besar mendominasi lanskap media dan **menyesuaikan pemberitaan untuk memenuhi kepentingan pemilik**—yang sebagian besar memiliki andil signifikan dalam industri energi, khususnya batu bara.

Indonesia adalah **eksportir global terkemuka untuk batu bara termal**, dengan **cadangan batu bara terbesar yang telah terbukti**. Negara peringkat kedua di kawasan ini, **Vietnam, memiliki kurang dari 10 persen jumlah batu bara yang dimiliki Indonesia**. Di tingkat domestik, **batu bara berkontribusi lebih dari 62 persen dari bauran energi Indonesia**. Sebaliknya, energi terbarukan, yang didominasi oleh tenaga air, hanya menyumbang **12,24 persen dari bauran energi negara ini**. Meski ada target untuk mencapai **23 persen energi terbarukan dari bauran energi pada tahun 2025**, Indonesia jauh **tertinggal untuk target ini**.

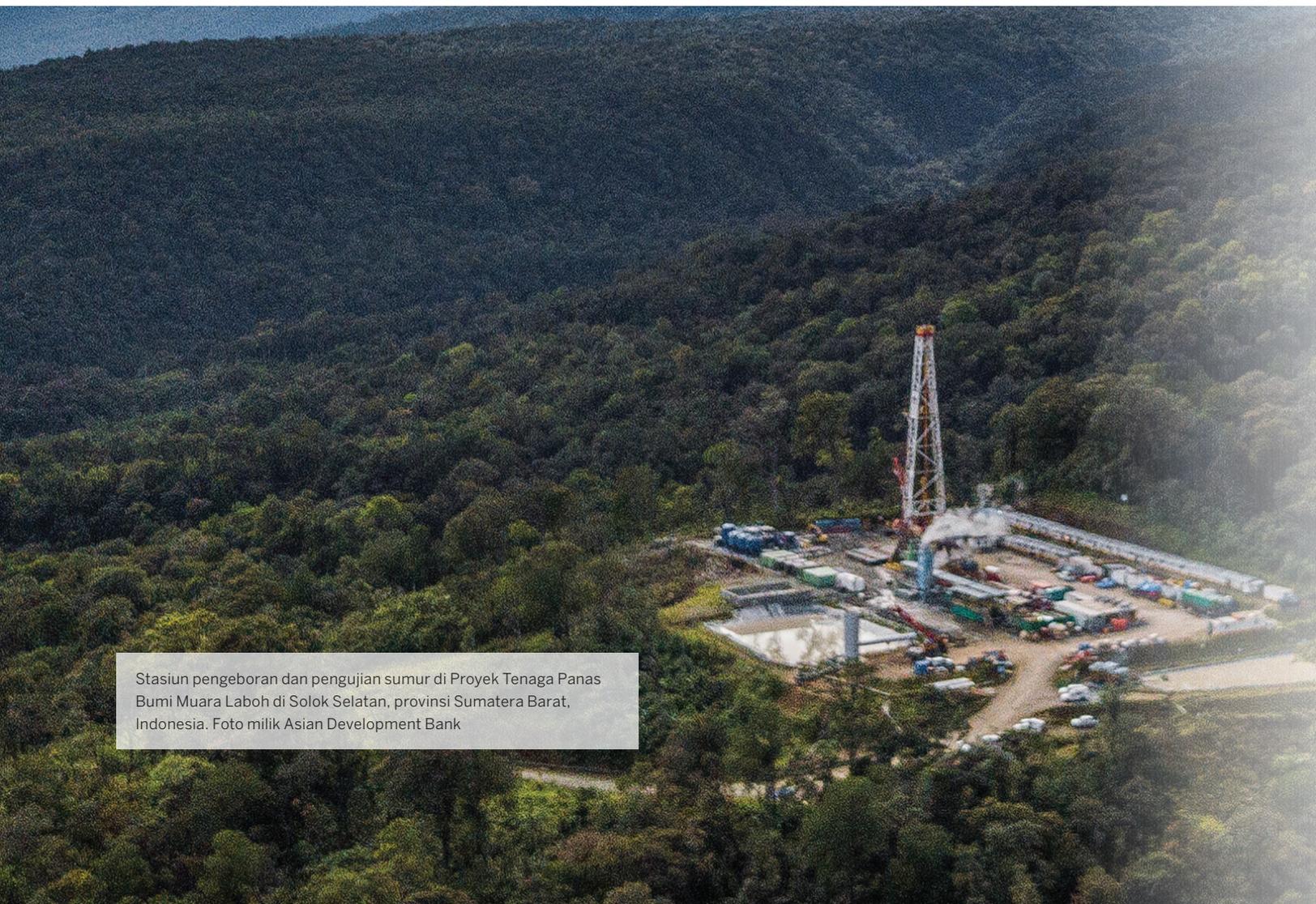
Dalam analisis media regional kami, Indonesia adalah satu-satunya negara yang membingkai narasi batu bara secara lebih positif di media sebagai hal yang tak terlepas bagi perekonomian bangsa. Artikel-artikel yang dianalisis menekankan bahwa penambangan batu bara memainkan peran yang sangat diperlukan dalam perekonomian Indonesia, sekalipun berpotensi merusak lingkungan. Bahkan saat **omnibus law** penambangan batu bara yang kontroversial dibahas, sebagian besar kritik ditujukan pada proses tidak demokratis yang memungkinkan undang-undang tersebut disahkan, alih-alih dampak lingkungan penambangan batu bara itu sendiri. Energi terbarukan, sebagian besar, masih dalam tahap awal pembangunan di negara ini; **instalasi tenaga surya dan angin masih sangat minim**. Oleh karena itu, banyak contoh artikel yang membahas energi terbarukan sebagai konsep umum, tidak memberikan wawasan khusus tentang teknologi dan penerapannya.

Secara keseluruhan, dua peneliti Indonesia kami mempelajari 390 artikel di 10 outlet berita dari Januari 2019 hingga Juli 2020 dan menemukan bahwa, sekalipun terdapat beberapa perkembangan positif untuk energi terbarukan, “sang raja batu bara” masih dipandang sebagai masa depan energi di Indonesia. Para peneliti sampai pada beberapa kesimpulan di bawah ini:

Poin Penting

- Artikel-artikel berita di Indonesia sering kali memandang batu bara dengan sangat positif, alih-alih negatif. Sekitar 67 persen artikel menggambarkan batu bara sebagai hal yang tidak tergantikan untuk pembangunan negara. Persentase ini jauh lebih besar dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya yang tercakup dalam studi regional ini. Saat masalah lingkungan dibahas, isu ini tidak terlalu mendapat tempat dalam liputan tersebut ketimbang kontribusi ekonomi dari sektor pertambangan negara.
- Bahkan ketika dampak negatif pembangkit listrik atau tambang batu bara dibahas, kami tidak menemukan artikel apa pun dalam 18 bulan yang membahas penghapusan batu bara dalam waktu dekat. Solusi yang diusulkan sering kali dirancang berdasarkan teknologi pembangkit batu bara yang lebih baik atau batu bara berkarbon lebih tinggi.
- Penambangan batu bara pada umumnya dianggap aman bagi masyarakat sekitar jika diatur dengan benar. Ketika kegiatan penambangan di daerah tertentu dianggap berbahaya atau berisiko, yang dipertanyakan adalah legalitasnya, bukan dampak penambangan itu sendiri.
- Kerja sama finansial mungkin telah memengaruhi pilihan kerangka batu bara, menurut dua jurnalis yang diwawancarai. “Ketika media menjadi konglomerasi untuk memperoleh keuntungan, media tersebut mengharapkan pemasukan,” kata seorang jurnalis Mongabay, Meidella Syahni, yang dulunya bekerja di media arus utama. “Kolaborasi advertorial dan [kerja sama finansial] lainnya memengaruhi setiap masalah yang diliput, termasuk masalah energi.” Deasy Indriwati dari media online Inidata juga memiliki pendapat yang sama: “BANYAK kepentingan bisnis [di media Indonesia]; ini telah menjadi masalah sejak zaman batu hingga saat ini.” Untuk menyajikan artikel energi yang baik, ujarnya, seorang jurnalis harus memiliki “nyali” untuk dapat menantang pengaruh dan kekuatan sektor energi.
- Dalam sampel tujuh outlet berita kami, tiga di antaranya—Okezone, *SindoneWS*, dan detikNews—dimiliki oleh perusahaan dengan kepentingan pertambangan batu bara yang signifikan. Okezone dan *SindoneWS* bersama-sama menerbitkan 62,5 persen artikel yang menyoroti kontribusi ekonomi positif dari industri batu bara.
- Pemerintah Indonesia sedang mencoba mengesahkan omnibus law dan undang-undang pertambangan batu bara, yang pada dasarnya akan mempersingkat proses bisnis untuk mendapatkan izin pertambangan. Meskipun undang-undang tersebut digambarkan sebagai isu kontroversial di media Indonesia, sebagian besar kritik ditujukan pada kurangnya transparansi legislatif dan keterlibatan masyarakat sipil dalam pembuatan keputusan, bukan dampak lingkungan dan manusia dari penambangan batu bara itu sendiri.

- Empat puluh lima persen artikel energi terbarukan membahas konsep tersebut secara umum tanpa menyebutkan teknologi alternatif tertentu. Editor dari kompas.com, Erlangga Djumena, mengatakan energi terbarukan “kalau EBT keterbatasan narasumber, karena masih jarang... plus narasumber terlalu teknis. Jangankan pembaca,, wartarnya aja bingung.” Karena kurangnya pemahaman ini, sulit bagi jurnalis untuk menelaah lebih dalam tentang sumber energi terbarukan tertentu.
- Namun demikian, lebih dari 98 persen artikel energi terbarukan diliput secara positif, dengan alasan bahwa pembangunan energi terbarukan akan memastikan keamanan energi bagi Indonesia sekaligus mengurangi emisi karbon. Berbeda dengan media Thailand, beberapa artikel tidak menyebutkan perlunya penghapusan batu bara untuk mengurangi emisi, dengan alasan bahwa mengganti minyak dan gas—yang saat ini diimpor oleh negara tersebut—sudah cukup.
- Perkembangan biofuel yang pesat di Indonesia baru-baru ini didorong oleh program B20, yang secara umum dipuji oleh media arus utama. Namun, biofuel berasal dari kelapa sawit—**industri yang begitu kontroversial dalam kaitannya dengan kebakaran dan penggundulan hutan yang meluas di negara ini**, dengan para pendukung yang kuat.
- Kumparan, media online yang diterbitkan oleh perusahaan media baru, dinilai menonjol karena menerbitkan 35 artikel tentang manfaat energi terbarukan—paling banyak dari semua outlet yang diteliti. Sebaliknya, mereka hanya menerbitkan enam artikel yang memuji batu bara. Hal ini mungkin dikarenakan oleh pendekatan editorial unik media ini yang memungkinkan users untuk menerbitkan konten mereka sendiri. Separuh artikel energi dari Kumparan ditulis oleh kontributor eksternal. Hal ini menjadi harapan besar bagi masa depan pemberitaan energi terbarukan.
- Keragaman narasumber di industri media secara keseluruhan sangatlah langka. Lebih dari setengah artikel batu bara dan energi terbarukan dalam analisis kami hanya menyertakan kutipan dari satu narasumber saja—umumnya dari perwakilan pemerintah atau bisnis.
- Tipe berita hard news mendominasi pemberitaan energi, yang mencakup lebih dari 80 persen.
- Meskipun media arus utama memublikasikan artikel yang jauh lebih positif tentang batu bara, ada lebih banyak wire stories yang diproduksi dalam 18 bulan terakhir yang berfokus pada peluang energi terbarukan.



Stasiun pengeboran dan pengujian sumur di Proyek Tenaga Panas Bumi Muara Laboh di Solok Selatan, provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Foto milik Asian Development Bank

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan oleh Ari Ulandari dan Cherika Hardjakusumah, yang meneliti liputan umum tentang batu bara dan energi terbarukan di outlet media Indonesia. Kerangka waktu penelitian ini adalah Januari 2019 hingga Juli 2020.

1. Pengambilan Sampel

Ulandari mengambil sampel 350 artikel online dari tujuh media online komersial terbesar di Indonesia. Media online tersebut adalah:

- *Kompas*, versi online dari harian dengan sirkulasi terbanyak dan tertua di Indonesia.
- *Tribunnews*, jaringan surat kabar lokal yang didirikan oleh Kompas Gramedia, perusahaan pemilik *Kompas*.
- *Liputan6*, versi online dari program berita televisi dengan nama yang sama, ditayangkan di SCTV.
- *Okezone*, portal berita khusus online yang dimiliki oleh MNC Corporation.
- *Sindonews*, versi online harian Koran Sindo, outlet media arus utama yang lebih baru yang terkenal dengan kreativitasnya. Juga dimiliki oleh MNC Corporation.
- *detikNews*, salah satu pionir portal berita khusus online yang dimiliki oleh CT Corporation.
- *Kumparan*, portal berita online di mana pengguna dapat menyumbangkan artikel.

Kumpulan artikel yang tersimpan di arsip outlet dipilih menggunakan kata kunci “batu bara” dan “energi terbarukan”. Sampel outlet berita dipilih untuk mewakili outlet media digital dan tradisional. Publikasi khusus digital meliputi *detikNews*, *Okezone*, dan *Kumparan*. Media tradisional mencakup *Kompas*, *Tribunnews*, *Sindonews*, dan *Liputan6*.

Beberapa publikasi online di Indonesia memberikan ruang bebas bagi penggunanya untuk memublikasikan artikel mereka sendiri. Dalam penelitian ini, 52 persen sampel cerita dari *Kumparan* ditulis oleh penggunanya. Pengguna *Kumparan* adalah kontributor amatir atau jurnalis dari berbagai media lokal.

Penelitian tambahan yang dilakukan oleh Cherika Hardjakusumah mempelajari arsip online dari ketiga outlet media berikut:

- *Kompas*.
- *Tempo*, versi online majalah berita dan politik mingguan Indonesia dengan nama yang sama.
- *Bisnis*, versi online harian *Bisnis Indonesia*.

Ketiga outlet tersebut dimiliki pihak swasta, meskipun *Kompas* dan *Bisnis* serupa karena merupakan surat kabar harian versi online. *Bisnis* lebih melayani pembaca bisnis dan memiliki

hubungan pendiri dengan Partai Nasional Demokrat, yang saat ini menjadi bagian dari koalisi pemerintah. *Tempo*, salah satu majalah mingguan tertua di Indonesia, terkenal dengan pemberitaan politik dan investigasi yang mendalam. *Tempo* dimiliki oleh Grup *Tempo*, dan Grup *Ciputra* merupakan pemegang saham utamanya, dengan ikatan yang kuat dengan pertambangan. Hardjakusumah melakukan pencarian artikel menggunakan kata kunci “minerba” (batu bara dan mineral), “batu bara” (batu bara), “omnibus law,” dan “RUU” (rencana undang-undang).

2. Analisis Konten

Untuk analisis konten, peneliti media *Climate Tracker* menggunakan metode pengodean standar yang dikembangkan dengan masukan peneliti. Dengan metode ini, para peneliti menganalisis artikel menurut 22 parameter dalam lima kategori: Jenis Artikel, Fokus Tematik, Pembingkai Lebih Luas, Literasi Energi, dan Sumber yang Digunakan.

3. Analisis Pembingkai (framing analysis)

Dari semua artikel yang terkumpul, sampel representatif dari 82 dari 350 artikel kemudian dipilih oleh Ulandari dan 20 dari 46 artikel oleh Hardjakusumah untuk analisis pembingkai yang lebih mendalam, yang melibatkan pertanyaan tentang pilihan sumber, citra, dan strategi diskursif setiap artikel. Pola analisis pembingkai dapat ditemukan [di sini](#).

4. Wawancara dengan Jurnalis

Secara keseluruhan, enam editor dan 13 wartawan diwawancarai selama penelitian ini. Sembilan di antaranya bekerja di media terpilih, yakni *Liputan6*, *detikNews*, *Kompas*, *Kumparan*, dan *Okezone*, sedangkan sisanya bekerja di media lain—*Viva*, *Inidata*, *CNBC*, *ANTARA*, *Republika*, *the Jakarta Post*, dan *Mongabay Indonesia*. Narasumber dipilih berdasarkan pengalaman mereka dalam pemberitaan energi di media online arus utama di Indonesia.



Ari Ulandari | @Ulandari_ari

Ari Ulandari adalah penulis dan peneliti yang berfokus pada isu lingkungan. Sebelumnya, dia bekerja sebagai penulis konten di *Kumparan*. Tesis masternya membahas tentang bom Bali 2002. Sebagai penulis lepas, dia menggunakan keahliannya untuk memberikan lebih banyak informasi tentang gerakan lingkungan, terutama gerakan iklim.

Pengantar

Dalam laporan ini, saya akan membahas analisis tentang media online di Indonesia untuk menjawab pertanyaan penelitian, “Bagaimana media Indonesia membingkai isu masa depan energi di Indonesia?” Penelitian ini dilakukan antara Juni dan Oktober 2020 dan mencakup tujuh media online terbesar di Indonesia. Meskipun energi terbarukan dan transisi energi **belum menjadi masalah arus utama di media nasional**, menganalisis kerangka energi, pengaruh, dan praktik yang ada sangat penting untuk lebih memahami narasi saat ini dan mendatang dalam peliputan isu energi.

Indonesia sedang dalam tahap awal transisi energi. Saat ini, bahan bakar fosil masih menjadi raja di negeri ini; **batu bara berkontribusi 62,07 persen terhadap bauran energi pada kuartal pertama 2019, sementara energi terbarukan, termasuk energi dari air, masih stagnan di 12,24 persen**. Sementara itu, pemerintah Indonesia sedang berupaya mencapai bauran energi 23 persen pada tahun 2025, **meskipun kebijakan untuk menarik investor tenaga surya dan angin sangat tidak memadai**. Satu-satunya sumber energi terbarukan yang mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir adalah bahan bakar hayati (biofuel), yang tetap sangat kontroversial karena **dihasilkan dari kelapa sawit**.

Pembahasan

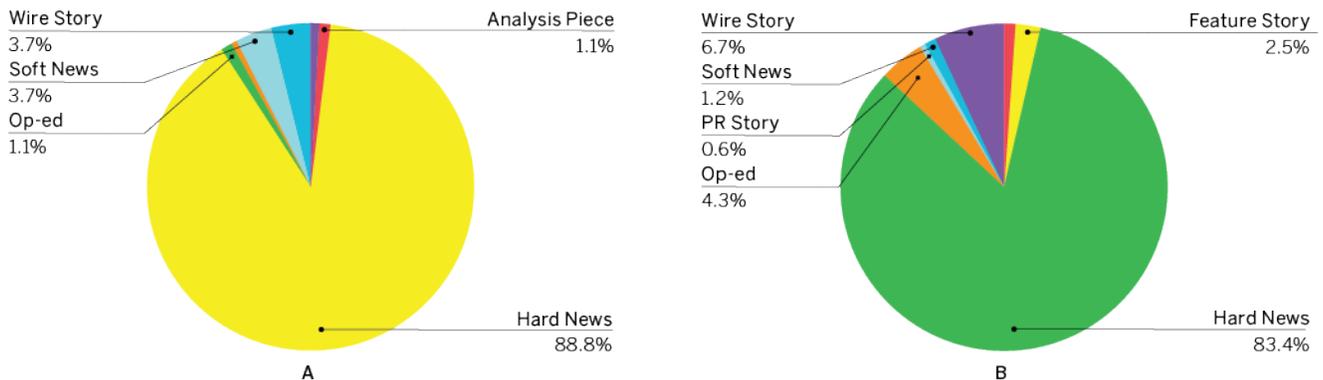
Analisis Kuantitatif: Jenis dan Prevalensi Artikel

Hard news mendominasi 80 persen total sampel

Penelitian saya dimulai dengan analisis kuantitatif, sebuah proses saat saya mengelompokkan artikel berdasarkan jenis dan kanal artikel diterbitkan. Lebih dari 80 persen artikel energi disajikan sebagai hard news di Indonesia. Namun demikian, ada perbedaan nuansa antara artikel energi terbarukan versus batu bara: persentase wire stories dan opini editorial tentang energi terbarukan jauh lebih tinggi daripada batu bara. Dalam sampel artikel, hanya ada satu opini editorial tentang batu bara, yang mana artikel tersebut membahas peluang ekonomi. Sebaliknya, opini editorial seputar energi terbarukan lebih beragam, mencakup sudut pandang ekonomi, politik, dan lingkungan.

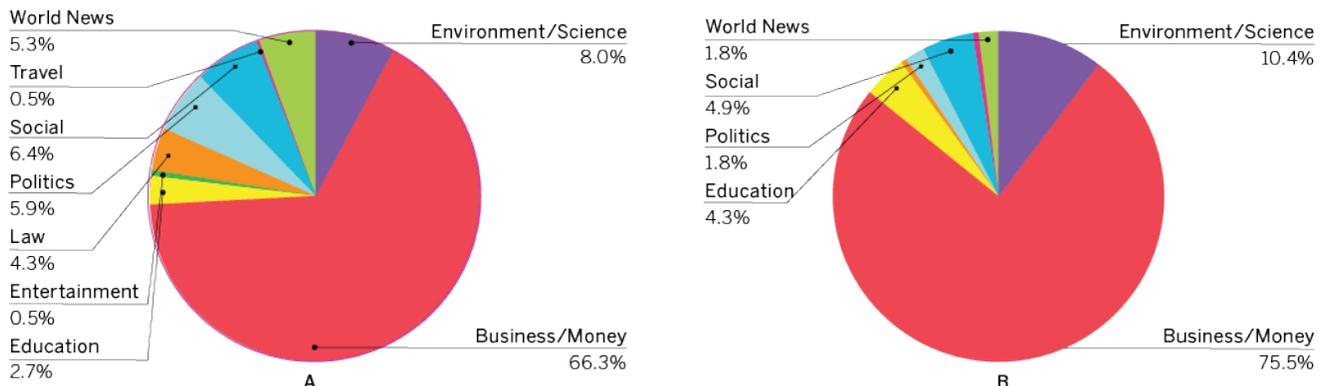
Jenis artikel menentukan berapa banyak waktu dan usaha yang dihabiskan seorang jurnalis untuk menulis artikel tersebut. Seorang jurnalis dari Mongabay Indonesia, Meidella Syahni, mengatakan, “Kalau hard news, biasanya aku ikutin dulu aja, kita rekam atau ketik aja dulu semua informasi yang kita dapat.” Namun, Syahni menjelaskan, “kalau feature: biasanya kita udah

Gambar 1. Jenis artikel batu bara (A) dan energi terbarukan (B)



Kebanyakan artikel energi ditempatkan di kanal ekonomi yang membahas dampak ekonomi

Gambar 2. Kanal untuk artikel batu bara (A) dan energi terbarukan (B)



punya 30% informasi. Jadi kita udah punya angle yang mau kita ambil dan bahas, namun belum tentu itu yang kita tulis. Nah dari situ kita bisa memilah informasi, kutipan yang akan kita pakai. Kalau in depth, hampir sama sih [dengan feature].”

Dengan kata lain, hard news adalah jenis berita yang paling sederhana, sehingga jurnalis dapat membuat banyak liputan berita energi dalam waktu relatif singkat. Seorang jurnalis dari kompas.com, Rully Ramli, mengatakan bahwa tekanan untuk meraup banyaknya jumlah tayang mungkin memengaruhi keputusan untuk memprioritaskan hard news daripada jenis artikel lainnya. “Media online sekarang lebih mengedepankan kuantitas daripada kualitas,” katanya. Media akan menyajikan lebih banyak hal yang lebih mungkin diklik dalam waktu singkat.

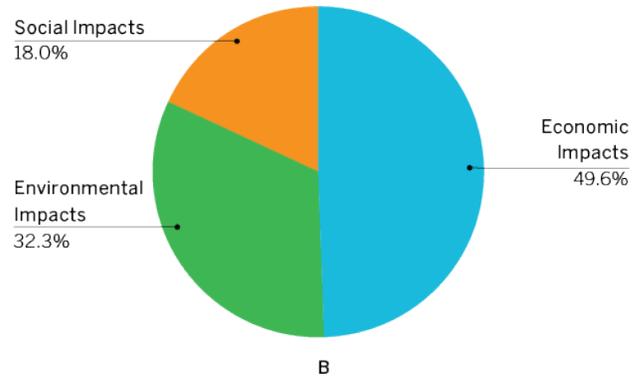
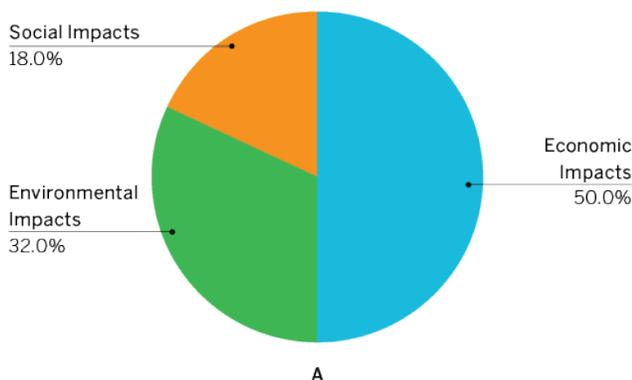
Dilihat dari penempatan artikel di setiap outlet berita, artikel energi lebih banyak ditempatkan di segmen bisnis/keuangan/ekonomi (lebih dari 65 persen). Di antara sampel publikasi, tiga dari tujuh mendedikasikan sub bagian tertentu (masih dalam bagian bisnis atau ekonomi) yang berfokus secara khusus pada energi. Outlet dengan sub bagian tersebut, yakni Liputan6, *Tribunnews*, dan detikNews, menerbitkan lebih banyak artikel energi.

Jurnalis Mongabay Indonesia, Lusya Arumingtyas, menjelaskan bahwa sebagian besar artikel energi ditempatkan pada bagian bisnis karena kaitan erat antara energi dengan perekonomian. Ia mencontohkan liputan elektrifikasi di Papua yang berfokus pada dampak ekonomi energi.

“Energi itu erat banget kaitannya dengan ekonomi. misalnya di Papua. mereka udah lama sekali nggak dialiri oleh listrik. kemudian mereka berinisiasi untuk menggunakan dana desa untuk pembangunan mikro hidro. dengan adanya listrik masuk desa, memang ada lifestyle yang berubah dari mereka, menjadi lebih konsumtif. Tidak masalah ya karena hak membeli barang adalah hak semua orang, tapi disisi lain ada peningkatan kesejahteraan di sana. Mereka menjadi lebih produktif. Mereka bisa membuat noken pada saat malam hari.”

Editor dari kompas.com, Erlangga Djumena, lebih lanjut menekankan bahwa berita energi tidak hanya ditempatkan di kanal “bisnis” atau “ekonomi”. “Semuanya masuk ke money [kanal bisnis kompas.com], kecuali tersangkut ke hal kriminal, atau pelestarian alam dan lingkungan, nah itu udah beda [kanal] lagi.” ujarnya.

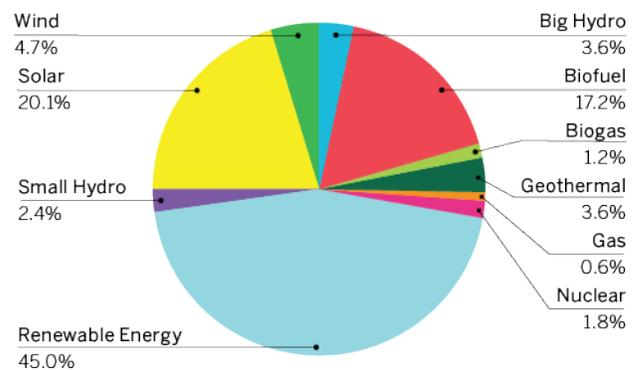
Gambar 3. Pembingkai tematik batu bara (A) dan energi terbarukan (B)



Tidak ada perbedaan signifikan dalam jenis dampak yang dibahas dalam artikel tentang batu bara dan energi terbarukan. Dampak ekonomi mendominasi pembingkai tematik (hampir 50 persen dari total sampel), disusul oleh dampak lingkungan (sekitar 32 persen). Dampak sosial menempati porsi terkecil (18 persen). Semua jurnalis yang diwawancarai yang bekerja untuk media arus utama ditugaskan di desk ekonomi. Hal ini dapat menjelaskan mengapa perspektif ekonomi mendominasi artikel-artikel mereka.

Kebanyakan artikel energi terbarukan tidak berfokus pada teknologi apa pun

Gambar 4. Artikel energi terbarukan berdasarkan teknologi dalam pembahasan



Secara cukup mengejutkan, hampir separuh artikel energi menampilkan energi terbarukan sebagai konsep umum tanpa memberikan pembahasan mendalam tentang satu pun sumber energi terbarukan, seperti surya atau hidro. Ini bisa jadi karena konsep energi terbarukan masih relatif baru atau asing di Indonesia, dengan sedikit perkembangan konkret dalam beberapa tahun terakhir. Editor kompas.com, Djumena, mengatakan energi terbarukan “kalau EBT keterbatasan narasumber, karena masih jarang...plus narasumber terlalu teknikal. jangankan pembaca, wartawannya aja bingung.” Karena kurangnya pemahaman ini, sulit bagi jurnalis untuk menelaah lebih dalam tentang sumber energi terbarukan tertentu. Banyak dari proyek energi terbarukan yang telah direncanakan berada di daerah terpencil. Hal ini tentu membatasi liputan jurnalistik. Jurnalis Mongabay Meidella Syahni mencatat, “Kalau di daerah mungkin akan lebih mudah mencari orang yang merasakan langsung ET, tapi kalau di Jakarta [basis



Sistem tenaga surya yang disumbangkan oleh Greenpeace di desa pesisir di provinsi Aceh, Indonesia, salah satu daerah yang terkena tsunami pada bulan Desember 2004. Foto oleh Hotli Simanjuntak/ Greenpeace

sebagian besar ruang redaksi arus utama] susah. ... Sulit untuk membangun cerita.” Tak heran, Kumparan yang menerima artikel dari kontributor di wilayah provinsi, menerbitkan hampir seperlima dari semua cerita energi terbarukan yang menyebutkan teknologi spesifik dalam studi ini.

Ketika sebuah artikel membahas satu jenis energi secara mendalam, kebanyakan fokusnya pada energi surya atau biofuel. Indonesia diidentifikasi sebagai negara dengan **potensi tenaga surya yang tinggi**, meskipun sumber energi ini **hanya memberikan kontribusi sedikit sebesar 24MW terhadap keluaran total**. Terkait biofuel, media telah memberikan perhatian pada rencana pemerintah belakangan ini untuk mengembangkan bahan bakar hayati minyak kelapa sawit melalui program **B-20 hingga B-100**, yang mewajibkan penggunaan bahan bakar diesel yang mengandung 20 persen bahan bakar hayati minyak sawit. Meskipun bahan bakar hayati yang berasal dari minyak sawit dicap oleh pendukung industri sebagai “energi bersih”, **sebagian besar masyarakat lingkungan internasional sangat menentangnya, dan banyak sumber di Indonesia juga tidak setuju** dengan karakterisasi ini karena kerusakan hutan penyerap karbon.

Oleh karena itu, hanya dari analisis kuantitatif, terlihat jelas bahwa media arus utama Indonesia sebagian besar mengklasifikasikan energi sebagai isu bisnis. Sebagai **ekonomi terbesar di ASEAN**, masa depan energi tidak dilihat dari sudut pandang lingkungan, melainkan dari sudut pandang ekonomi—terlepas dari kenyataan bahwa energi memengaruhi setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Analisis Kualitatif: Kerangka Cerita Energi Umum

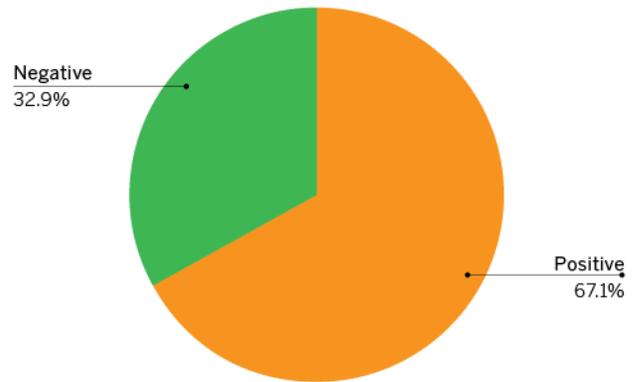
Sebelum menyelami hasil analisis kualitatif untuk framing, saya ingin membahas secara singkat penjabaran semua sampel artikel berdasarkan sikap “positif” versus “negatif” yang disajikan terhadap suatu sumber energi. Meskipun jurnalis dapat menampilkan sudut pandang yang beragam dalam tulisannya, artikel yang dikategorikan sebagai “positif” diakhiri dengan mendorong pertumbuhan sumber energi tertentu, sedangkan artikel yang dikategorikan sebagai “negatif” lebih mementingkan risiko yang terkait dengan pertumbuhan tersebut.

Dari 174 artikel batu bara yang menjadi sampel, 67,1 persen memandang sumber energi ini secara positif, sementara 32,9 persen memandangnya secara negatif—angka persentase yang cukup tinggi mengingat bahwa batu bara mendapatkan liputan yang lebih negatif daripada positif di semua negara Asia Tenggara lainnya dalam studi ini. Namun demikian, artikel energi terbarukan di Indonesia juga hampir tidak mendapat kritisi apa pun, dengan kurang dari 2 persen dari 175 artikel energi terbarukan yang menggunakan kerangka negatif untuk sumber energi terbarukan.

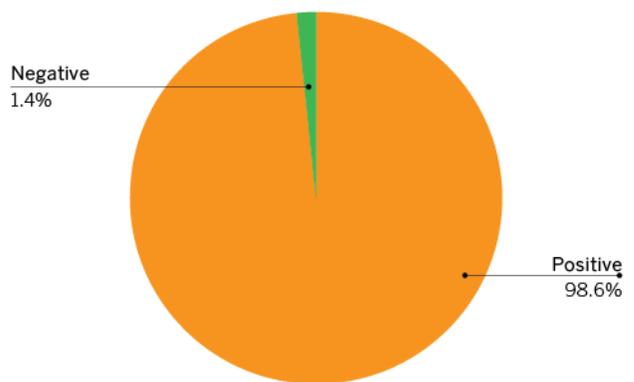
Setelah mengidentifikasi semua cerita sesuai dengan sikap dominan jurnalis, saya menganalisis pembingkai (framing analysis) yang disajikan dalam artikel-artikel energi secara lebih mendalam. Untuk melakukannya, saya memilih 82 artikel dari total 350 sampel awal, setengah berfokus pada batu bara dan setengah lagi berfokus pada energi terbarukan. Dari 82 artikel ini, saya menemukan enam kerangka (frame) yang umum digunakan dalam liputan energi seperti yang ditunjukkan pada gambar 6, yakni ekonomi, nilai moral, dampak kemanusiaan, konflik, atribusi tanggung jawab, dan ketidakberdayaan.

Gambar 5. Prevalensi kerangka positif versus negatif

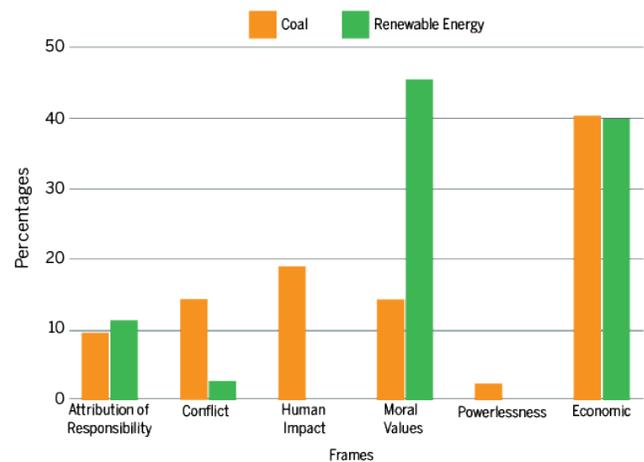
Coal articles from January 2019 to August 2020 by positive versus negative frames



Renewable energy articles from January 2019 to August 2020 by positive versus negative frames



Gambar 6. Kerangka (frame) dalam artikel batu bara dan energi terbarukan



Penjelasan mendalam tentang tiga kerangka yang paling sering ditemukan untuk setiap jenis energi disajikan lebih lanjut sebagai berikut:

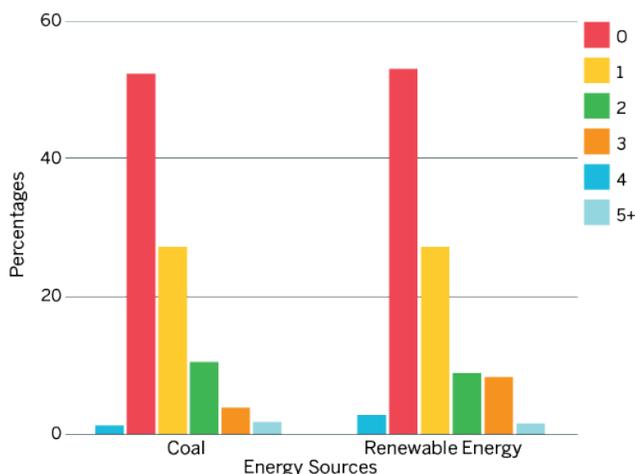
Batu bara dipandang sebagai materi yang sangat diperlukan untuk pembangunan ekonomi oleh pemerintah dan sumber bisnis

Enam kerangka (frame) berbeda untuk artikel batu bara digunakan dengan berbagai derajat frekuensi. Karena kerangka ekonomi merupakan bagian terbesar dari artikel batu bara maka pertamanya saya melakukan analisis mendalam tentang kerangka ini dengan memeriksa lebih lanjut topik artikel, tajuk utama, sumber yang dikutip, dan potensi bias yang relevan. Artikel dikategorikan menggunakan kerangka ekonomi jika berfokus pada dampak ekonomi dari kebijakan atau proyek energi di tingkat nasional, lokal, industri, atau perusahaan.

Karenanya, 17 artikel (40 persen dari artikel batu bara yang dianalisis) menggambarkan tambang dan pembangkit listrik tenaga batu bara sebagai hal yang sangat diperlukan untuk pembangunan ekonomi nasional. Tujuh belas berita ini tersebar di semua media yang dianalisis, meskipun Kumparan–satu-satunya media yang memungkinkan pengguna menerbitkan konten tulisan mereka sendiri–menonjol karena hanya menerbitkan satu cerita menggunakan kerangka (frame) ekonomi.

Dari sisi konten cerita, artikel tentang sisi ekonomi batu bara umumnya membahas dinamika industri batu bara, seperti volume perdagangan batu bara, harga, biaya produksi, dan dampak COVID-19. Secara menonjol, dari 17 artikel yang dijadikan sampel, enam khusus membahas topik **gasifikasi batu bara**, yang baru-baru ini mendapatkan perhatian dari media Indonesia, selagi pemerintah mencoba **meningkatkan nilai cadangan batu baranya untuk melindungi industri penambangan batu bara**,

Gambar 7. Jumlah narasumber dalam artikel energi



Dalam hal keragaman narasumber, seperti terlihat pada gambar 7, lebih dari 50 persen artikel tentang batu bara hanya menggunakan satu sumber informasi—untuk kerangka ekonomi, umumnya menggunakan narasumber dari kalangan pemerintah ataupun perwakilan bisnis. Meskipun terkadang satu artikel energi mengutip dua sumber, **kebanyakan berasal dari organisasi serupa dengan sudut pandang yang sama**; hanya 16 persen artikel mengutip tiga sumber atau lebih dan menawarkan sudut pandang yang lebih beragam.

Satu contoh artikel batu bara yang mengutip sumber yang beragam dengan lebih baik adalah **“ESDM: PKP2B [Perjanjian Karya Pengusahaan Penambangan Batubara] Beri Kepastian Perpanjangan Kontrak ke Pengusaha Batu Bara”** oleh Reynas Abdilla dari *Tribunnews*. Artikel tersebut mengutip tiga sumber: Direktur Jenderal Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan akademisi **Center of Reform on Economics** (CORE Indonesia). Meskipun dua sumber pertama pemerintah sepakat bahwa ekspansi industri penambangan batu bara sudah pasti, perwakilan CORE berpendapat bahwa itu akan menjadikan Indonesia bergantung pada dinamika harga batu bara global. Ini adalah sudut pandang yang biasanya hilang dari artikel yang tidak mengutip dari sumber akademis atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Secara keseluruhan, cerita ini mendorong penurunan skala industri batu bara secara progresif.

Topik ekonomi yang paling banyak dibahas berikutnya adalah manfaat ekonomi dari program gasifikasi batu bara, yang mengubah batu bara menjadi gas dimetil eter. Berdasarkan analisis yang ada, saya menemukan beberapa sudut pandang umum yang disajikan dalam topik ini adalah bahwa dimetil eter akan menjadi sumber energi yang murah, program tersebut akan mengurangi impor bahan bakar gas (LPG) nasional, dan program tersebut baik untuk pengembangan bisnis batu bara. Hampir dua pertiga dari jumlah artikel yang membahas topik ini diterbitkan oleh *Sindonews* dan *Okezone*, media yang dimiliki oleh MNC Corporation. Yohana Artha Uly, jurnalis *Okezone.com*, menulis sebuah artikel tentang strategi gasifikasi batu bara pemerintah dengan tajuk utama **“Mengurangi Impor LPG, Pemerintah Mendorong Gasifikasi Batu Bara Jadi Kebijakan Strategis.”** Cerita dimulai dengan pengenalan singkat rencana gasifikasi batu bara pemerintah, kemudian mencantumkan perusahaan batu bara yang akan menjadi target utama. Uly hanya menggunakan satu sumber, menteri energi dan sumber daya mineral, yang mengatakan gasifikasi akan menambah nilai batu bara dan mengurangi impor LPG. Oleh karena itu, cerita tersebut mendorong pandangan bahwa gasifikasi batu bara merupakan prioritas dalam rencana investasi pertambangan nasional untuk lima tahun ke depan, dan praktik tersebut akan mendapat dukungan pemerintah.

Lebih lanjut, artikel batu bara dengan kerangka ekonomi menyatakan bahwa Indonesia tidak dapat beralih ke energi terbarukan dengan mudah, karena masih banyak faktor yang belum terselesaikan yang mempersulit transisi dan banyak pihak yang mendukung batu bara. Jurnalis *CNBC Indonesia*, Anisatul, mengatakan, **“Batu bara akan ditinggalkan secara bertahap ke EBT karena energi fosil berdampak tidak baik ke lingkungan. Namun tidak bisa serta merta karena berbagai pertimbangan yang kompleks.”** Norman Joshua, jurnalis dari *the Jakarta Post* menambahkan, meskipun dalam rencana energi nasional (RUEN) bertujuan meningkatkan kontribusi energi terbarukan hingga 23 persen dari total bauran energi, beberapa penelitian menyebutkan Indonesia tidak akan mencapai target tersebut. **“Karena juga dalam kebijakan yang skalanya cukup besar yang membela penggunaan fosil dalam ekonomi kita. Ada peraturan yang mengatakan bahwa batu bara dijual di Indonesia tidak boleh lebih dari \$70/ton,”** ungkap Norman.

Batu bara disalahkan karena menyebabkan dampak kemanusiaan secara global

Setelah saya menganalisis artikel batu bara dengan kerangka ekonomi, saya berfokus pada kerangka dampak kemanusiaan yang merupakan frame paling populer kedua (delapan artikel). Dalam artikel yang menggunakan frame ini, batu bara dianggap memiliki



Seorang teknisi memeriksa panel surya di atap Masjid Agung Istiqlal di Jakarta, Indonesia. Foto oleh Yorri/Greenpeace



Ekskavator di samping kanal drainase lahan gambut memotong lahan gambut yang baru saja gundul dan terbakar di provinsi Riau, Indonesia. Foto oleh Natalie Behring/Greenpeace

potensi risiko bagi manusia karena menghasilkan polutan (dua artikel); berkontribusi terhadap pemanasan global (tiga artikel); serta mengancam nyawa pekerja dan penduduk di sekitar tambang batu bara (tiga artikel).

Yang jelas, dua cerita dari detikNews yang menyebut batu bara sebagai pencemar adalah wire stories internasional—dengan kata lain, mereka tidak secara khusus meliput pembangkit batu bara dan dampak penambangan batu bara terhadap lingkungan setempat di Indonesia. Sebuah artikel dengan tajuk utama “[Usai Lockdown, Udara di China Balik Lagi Diselimuti Polusi](#)” di detikNews diterjemahkan langsung dari *Guardian*. Seorang analis dari Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih yang independen mengatakan, “Cepatnya kembali polusi udara dan tingkat konsumsi batu bara di seluruh Tiongkok merupakan peringatan dini terkait seperti apa peningkatan polusi yang disebabkan oleh industri.” Namun demikian, [penelitian dari organisasi yang sama tentang kontribusi batu bara terhadap kualitas](#) udara Indonesia tidak dikutip. Meskipun cerita tersebut memuat video tentang kabut hitam di Jakarta, cerita tersebut tidak secara spesifik menyebutkan batu bara sebagai penyebab potensial.

Demikian pula, batu bara dipandang sebagai penyumbang krisis pemanasan global di artikel lainnya. Syanti Mustika, jurnalis dari detikNews, menulis “[Yuk Kenal Lebih Dekat dengan Global Warming](#),” sebuah soft news yang menyajikan sains iklim berdasarkan informasi dari situs web National Aeronautics and Space Administration (NASA) dan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim. Artikel tersebut secara singkat merujuk pada bahan bakar fosil, termasuk batu bara, sebagai penyebab pemanasan global tetapi tidak menghubungkan masalah tersebut dengan industri batu bara Indonesia.

Satu-satunya cerita yang secara langsung menghadirkan dampak batu bara bagi kehidupan masyarakat Indonesia adalah tentang penambangan batu bara, khususnya penambangan batu bara “ilegal”. Dalam sampel analisis framing, satu artikel oleh kontributor *Kompas* yang melaporkan dari hot spot penambangan batu bara Kalimantan membahas masalah ini, di bawah tajuk utama “[Tambang Batu Bara Ilegal di Waduk Samboja Kutai Kartanegara Ancam 960 Jiwa](#).” Cerita dimulai dengan kutipan langsung dari Kepala Otoritas Daerah Aliran Sungai Kalimantan yang menegaskan bahwa “penambangan batu bara ilegal hanya berjarak 15 meter dari hulu bendungan besar”. Sebuah foto udara penambangan batu bara di Kalimantan membantu pembaca membayangkan situasi terkini di sana. Asumsi yang mendasari cerita ini adalah bahwa kegiatan ilegal dapat memecah penghalang bendungan dan mengancam 960 nyawa di daerah tersebut—sebuah bencana lingkungan. Status “legal” dan “ilegal” menggeser atribusi kesalahan pada sebuah proyek penambangan, bukan bahaya yang melekat pada penambangan batu bara itu sendiri.

Pengurangan emisi dipandang sebagai tanggung jawab terhadap masyarakat internasional

Kerangka (frame) ketiga yang paling sering digunakan dalam pemberitaan batu bara adalah kerangka nilai moral, yang menyoroti nilai universal dari tanggung jawab untuk membahas pengurangan emisi. Saya menempatkan enam artikel batu bara di bawah kategori ini karena menyebutkan kata “tanggung jawab” atau konsep luhur, seperti komitmen Indonesia kepada masyarakat internasional—sering kali tanpa membahas manfaat praktis dari pengurangan emisi bagi masyarakat dan lingkungan setempat. Empat dari enam cerita ini menekankan [Laporan 1,5 derajat Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim](#), Perjanjian Paris, dan contoh emisi rendah dari negara lain.

Namun demikian, enam artikel yang menggunakan kerangka nilai moral semuanya tidak secara gamblang menganjurkan transisi energi dari batu bara, tetapi menyerukan solusi seperti menggunakan teknologi dan peraturan untuk mendorong batu bara “bersih”—yang didefinisikan sebagai batu bara dengan kandungan karbon tinggi yang dibakar dengan teknologi super kritis. [Sebuah artikel dari Okezone](#), yang mengutip komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris, menyatakan kemungkinan untuk membuat batu bara “bersih”. Menteri energi dan sumber daya mineral, Arifin Tasrif, seperti dikutip mengatakan teknologi seperti Siklus Gabungan Gasifikasi dan Ultra-super kritis Terpadu adalah “bukti bahwa kami mematuhi Perjanjian Paris dalam menciptakan lingkungan yang bersih.”

Meskipun saya tidak berhasil mendapatkan kesempatan mewawancarai penulis artikel, saya mendapatkan pandangan mengenai hal ini dari editor Okezone, Dani Jumadil Akhir. “Tidak semua batu bara tidak ramah lingkungan,” kata Akhir. “Ada batu bara yang lebih tinggi kandungannya dan tidak membuat lingkungan tercemar... dia [batu bara karbon tinggi] walaupun batu bara, baik untuk lingkungan sekitar. dia tidak mengganggu lingkungan masyarakat pada umumnya.” Karenanya, Akhir percaya bahwa Indonesia hanya bertanggung jawab untuk menggunakan batu bara emisi rendah, tidak menghapus batu bara secara keseluruhan.

Kerangka tanggung jawab moral tidak hanya digunakan untuk menjelaskan komitmen pemerintah, tetapi juga komitmen sektor swasta. Maulandy Rizki Bayu Kencana dari *Liputan6* menulis artikel tentang “pembayaran hijau” yang membahas bagaimana bank terbesar di Indonesia, [Bank Mandiri, memiliki tanggung jawab untuk memperketat persyaratan pinjaman bagi perusahaan penambangan batu bara dan kelapa sawit](#). Direktur utama bank tersebut mengatakan bahwa persyaratan lingkungan yang ketat untuk pembiayaan akan membuat orang lebih bertanggung jawab saat memulai bisnis penambangan dan kelapa sawit. “Kami telah mengirim tim untuk belajar dari negara lain tentang bagaimana secara perlahan menggerakkan Indonesia menuju pembiayaan hijau,” pungkasnya. Sekali lagi, nilai moral tanggung jawab sosial digunakan untuk memperkenalkan peraturan, alih-alih pengurangan kegiatan penambangan batu bara.

Dua artikel di atas menunjukkan bahwa meskipun beberapa artikel memandang pengurangan emisi dan perlindungan lingkungan sebagai tanggung jawab sosial, mereka hanya menyerukan peraturan yang lebih ketat, alih-alih penghapusan batu bara—yang bertentangan langsung dengan [Perjanjian Paris](#) yang dikutip beberapa jurnalis.

Hubungan outlet media dengan industri batu bara dapat memengaruhi pemberitaan jurnalis

Untuk meringkas bagian tentang kerangka artikel batu bara, cukup masuk akal jika dikatakan bahwa media sebagian besar menggambarkan batu bara sebagai kontributor utama energi dan masa depan ekonomi Indonesia. Tidak ada artikel yang secara eksplisit menyerukan penghentian penggunaan batu bara, hanya sebatas menyerukan peraturan dan batu bara yang “lebih bersih”. Meninjau lebih jauh mengenai kepemilikan media di Indonesia mungkin memberikan wawasan tentang narasi ini.

Tiga dari tujuh outlet berita yang diteliti—*Sindonews*, Okezone, dan detikNews—merupakan milik konglomerat yang memiliki saham di penambangan batu bara. *Sindonews* dan Okezone berada di bawah naungan [MNC Group](#), yang memiliki lebih

dari 50 persen Nuansacipta Coal Investment dan Bhakti Coal Resources, sedangkan detikNews dimiliki oleh **CT Corp**, yang anak perusahaannya CT Global Resources, menurut situs webnya, “berdedikasi terhadap bisnis perkebunan, serta ekspansi energi, pertambangan pada masa mendatang.” Bersama-sama, ketiga publikasi ini bertanggung jawab atas setengah dari artikel yang menganggap batu bara sebagai hal yang sangat diperlukan bagi perekonomian Indonesia dan empat dari enam artikel yang mempromosikan gasifikasi batu bara. DetikNews menerbitkan dua artikel yang menghubungkan batu bara dengan polusi udara dan pemanasan global; namun demikian, keduanya merupakan wire stories dan tidak berisi detail khusus untuk Indonesia. Seperti yang telah dibahas di atas, Okezone menerbitkan artikel yang menyarankan bahwa dengan teknologi batu bara terkini, Indonesia masih dapat mengembangkan batu bara sembari tetap memenuhi tujuan Perjanjian Paris.

Tidak ada jurnalis yang diwawancarai dari ketiga outlet ini yang secara langsung mengakui keterkaitan media dengan sektor energi sebagai faktor dalam memilih kerangka untuk cerita energi. Editor dari detik.com memang mengakui bahwa “kerja sama jelas ada” antara perusahaan energi dan jurnalis, tetapi mengatakan hal ini “tidak banyak berpengaruh pada proses penulisan.” Dia

menjelaskan “proses konfirmasi” saat jurnalis mengirimkan teks artikel yang ditulis sebelum diterbitkan untuk “pemeriksaan fakta” kepada pihak lain.

Beberapa jurnalis dari outlet lain berbicara lebih eksplisit tentang pengaruh kepemilikan dan sumber iklan terhadap independensi editorial di Indonesia. Meidella Syahni, jurnalis Mongabay Indonesia yang dulunya bekerja di media arus utama mengatakan, “Kolaborasi advertorial dan [ikatan keuangan] lainnya memengaruhi setiap masalah yang dilaporkan, termasuk masalah energi. Contohnya, tentang masalah batu bara, outlet media yang mengharapkan pendapatan dari iklan akan memberikan ruang bagi perusahaan batu bara untuk memasang iklan, advertorial, dan segala macam hal.” Menurut Syahni, pengaruh tersebut mungkin tidak disadari oleh wartawan sebelum artikel itu terbit. “Tak peduli betapa independennya wartawan... artikel mereka [tentang batu bara] bisa saja dipotong atau tidak diterbitkan sama sekali,” ungkapnya.

Deasy Indriwati dari media online Inidata.id menyampaikan pendapat yang sama melalui email: “BANYAK kepentingan bisnis [di media Indonesia]; ini telah menjadi masalah sejak zaman batu hingga saat ini”. Untuk menyajikan artikel energi yang baik, ujarnya, seorang jurnalis harus memiliki “nyali” untuk dapat



Seorang pria merawat kudanya di lapangan rumput dekat sebuah peternakan turbin angin di Jeneponto, provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Foto oleh Muchtamir/Greenpeace

menantang pengaruh dan kekuatan sektor energi. Mengingat kepentingan finansial yang dimiliki oleh surat kabar arus utama di sektor batu bara, jurnalis mungkin juga perlu mencari “dana yang cukup” dari sumber independen untuk melakukan pemberitaan semacam itu, lanjutnya.

Menariknya, jurnalis yang diwawancarai menyatakan bahwa dirinya tidak mengalami pengaruh luar, bekerja bukan untuk outlet komersial, tetapi untuk ANTARA—kantor berita milik negara Indonesia. Jurnalis ini mengatakan ANTARA “tetap mengedepankan kemandirian dalam mencari informasi...tidak ada paksaan dari pihak lain...kita bebas. Yang penting ini sesuai dengan etika jurnalistik”. Jurnalis tersebut juga mengatakan energi adalah masalah yang kurang sensitif dibandingkan isu politik.

Secara keseluruhan, dua jurnalis yang berpengalaman di media arus utama mengatakan bahwa mereka yakin tekanan dari kepemilikan redaksi dan pembeli iklan dapat sangat memengaruhi kerangka artikel. Satu-satunya jurnalis yang mengungkapkan pendapat berbeda bekerja untuk outlet nonkomersial.

Pengembangan energi terbarukan dipandang sebagai keharusan moral karena masalah lingkungan dan keamanan

Selanjutnya, saya menganalisis tiga kerangka artikel paling populer yang digunakan dalam artikel energi terbarukan: nilai moral, ekonomi, dan atribusi tanggung jawab. Seperti sebelumnya, saya mengategorikan kerangka (frame) suatu artikel berdasarkan sudut pandang dominan dan melanjutkan dengan analisis mendalam tentang tajuk utama, kutipan, penempatan kutipan, dan penggunaan bahasa.

Meskipun media di Indonesia tidak membahas perlunya penghapusan batu bara, mereka cenderung menyusun pengembangan energi terbarukan yang diperlukan untuk menggantikan bahan bakar fosil lain seperti minyak dan gas, yang harus diimpor oleh Indonesia. Banyak dari kerangka artikel ini termasuk dalam kategori “nilai moral” untuk memanggil rasa tanggung jawab sosial dan patriotisme pembaca. Secara khusus, pengembangan energi terbarukan dijelaskan sebagai keharusan moral dalam 16 artikel—47 persen dari total artikel energi terbarukan yang diteliti. Argumen umumnya adalah bahwa energi terbarukan dapat membantu Indonesia mencapai masa depan yang mandiri energi, sehingga harus mengambil porsi yang lebih besar dari keluaran energi negara. Kumparan dan Okezone menjadi yang teratas sebagai outlet yang menerbitkan artikel paling banyak dengan kerangka ini, jika digabungkan mencapai 10 dari 16 cerita. Khususnya, di Kumparan, yang mengizinkan konten buatan pengguna, dua cerita dengan kerangka ini ditulis oleh pengguna situs.

Tujuh artikel, seperti [salah satu artikel yang dipublikasikan oleh Okezone](#), dikutip dari sumber pemerintah yang mengatakan bahwa meskipun pembangunan energi terbarukan cukup menantang, hal ini tetap penting bagi Indonesia. Dalam artikel Okezone, direktur program elektrifikasi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan, “Pada waktu mendatang, banyak tantangan yang kita hadapi dalam mengembangkan energi terbarukan. [Namun] energi terbarukan tidak hanya bersih; energi ini membantu kita menuju ketahanan energi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di negara kita, bukan impor”. Direktur tersebut kemudian mengutip rencana pemerintah untuk memasang panel surya di bekas daerah penghasil batu bara sebagai bukti komitmennya untuk meningkatkan energi terbarukan hingga 23 persen dari bauran energi nasional. Namun demikian,

tidak ada sumber eksternal yang dikutip untuk memverifikasi atau memberikan komentar atas rencana tersebut.

Beberapa artikel memandang kebutuhan Indonesia untuk mengurangi emisi dan tanggung jawabnya terhadap perjanjian internasional dan badan internasional sebagai keharusan moral. Resya Firmansyah menulis cerita untuk Kumparan dengan tajuk utama “[Bersedia Memajukan Penggunaan Energi Terbarukan di Indonesia, PLN \[Perusahaan Listrik Negara\] Bekerja Sama Dengan Akselerator Investasi Energi Bersih \[Clean Energy Investment Accelerator/CEIA\]](#).” Cerita ini, mengutip perwakilan bisnis (wakil presiden PLN) dan akademisi dari World Resources Institute, memperkenalkan pandangan bahwa komitmen PLN untuk mengurangi emisi karbon berarti mendukung investasi energi terbarukan di Indonesia.

Energi terbarukan dipandang sama baiknya untuk perekonomian

Namun demikian, outlet media tidak hanya memiliki cita-cita luhur tentang energi terbarukan; mereka juga memberitakan lebih banyak masalah penting lainnya yang berkaitan dengan dampak ekonomi transisi energi. Sebenarnya, kerangka paling umum kedua yang saya temukan untuk cerita energi terbarukan adalah kerangka ekonomi (12 artikel) atau mencapai 40 persen total sampel untuk energi terbarukan. Saat memeriksa tajuk utama artikel, kutipan, dan bahasa reportase, lima narasi utama yang muncul dari 12 artikel tersebut adalah energi terbarukan dapat menjadi sumber pendapatan nasional dan daerah (empat artikel), menarik investasi asing (tiga artikel), menyediakan pekerjaan bersih (dua artikel), menambah nilai produk pertanian (dua artikel tentang program bahan bakar hayati—biofuel—B-20—B-100), dan mendukung pengembangan bisnis (satu artikel). Seperti sebelumnya, Kumparan berada di posisi teratas karena menerbitkan lima dari 12 cerita—paling banyak dari semua media yang diteliti.

Alasannya mungkin karena Kumparan menerbitkan ulang artikel dari media lokal di daerah dengan pengembangan energi terbarukan yang lebih dinamis. Cerita bertajuk utama “[Aceh Meningkatkan \[Kontribusi\] Energi Terbarukan, Ini Beberapa Sumbernya](#)” diterbitkan oleh Aceh Kini, media online lokal yang menggunakan Kumparan sebagai wadah untuk menyampaikan ceritanya kepada khalayak nasional. Cerita ini mengutip pernyataan PLT Gubernur Aceh yang mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menciptakan energi terbarukan 12,25 persen dari bauran energi daerah pada tahun 2022 karena potensi keuntungan ekonomi bagi daerah tersebut.

Energi terbarukan, sebagai teknologi baru, juga dianggap menarik bagi investor asing. Dua dari tiga artikel yang menggunakan kerangka ini membahas Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung Cirata, yang dipuji sebagai pembangkit tenaga surya terapung terbesar di Asia Tenggara. Satu artikel dari [Okezone](#) mengutip informasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menunjukkan bahwa harga jual listrik dan saham perusahaan yang terlibat dalam proyek tersebut menguntungkan. [Artikel kedua dari Detik](#) secara khusus disebutkan bahwa PLTS Cirata menerima investasi asing dari Uni Emirat Arab, menunjukkan bahwa negara lain memandang tenaga surya sebagai investasi yang lebih murah dan lebih menguntungkan daripada batu bara.

Ringkasnya, ketika menggunakan kerangka ekonomi, jurnalis menekankan bahwa energi terbarukan dapat menjadi sumber pendapatan, menarik investor asing, memberi pekerjaan bersih (clean jobs), menambah nilai produk Indonesia, dan mendukung

pengembangan bisnis. Kelima narasi ini berkontribusi terhadap pertumbuhan energi terbarukan pada masa mendatang yang dipandang sebagai perkembangan positif di Indonesia. Namun demikian, secara jelas tidak terlihat adanya artikel yang memandang energi terbarukan sebagai basis utama sumber energi dan tidak ada yang memandangnya sebagai pengganti batu bara.

Kebijakan energi terbarukan membutuhkan dukungan lebih lanjut dari pemerintah dan masyarakat

Dua kerangka energi terbarukan yang pertama menganalisis energi terbarukan yang dilihat dari sudut pandang optimis; Kerangka energi terbarukan terpopuler ketiga, atribusi tanggung jawab, mengangkat masalah yang lebih pragmatis, seperti hambatan saat ini untuk pengembangan energi terbarukan lebih lanjut. Dalam penelitian ini, saya menemukan bahwa empat cerita (12 persen dari contoh artikel energi terbarukan) meminta pemerintah dan publik untuk mendukung pembangunan energi terbarukan melalui perubahan kebijakan. Dalam artikel ini, kritik terhadap kebijakan pemerintah atau kurangnya kesadaran publik banyak ditemukan, terkadang disertai dengan solusi potensial. Semua cerita yang dikutip dari akademisi di universitas atau LSM, terkadang menjadi satu-satunya sumber.

Nanang Wijayanto, jurnalis *Sindonews*, membuat artikel dengan tajuk utama “**Aturan ESDM [Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral] Soal Energi Terbarukan Dinilai Tak Konsisten, Investor Bingung.**” Cerita tersebut menggunakan kutipan dari direktur International Geothermal Association saat dia berpendapat bahwa peraturan saat ini tentang energi terbarukan terus berubah-ubah, peraturan membingungkan calon investor, dan undang-undang tentang energi terbarukan harus menjadi prioritas DPR. Artikel tersebut mengklaim bahwa peraturan yang berubah-ubah dianggap umum di Indonesia, tetapi dampaknya terhadap investasi energi terbarukan cukup signifikan.

Ada juga artikel yang memandang pengembangan energi terbarukan membutuhkan dukungan dari masyarakat umum. Hanif Hawari, jurnalis *detik.com*, menulis artikel dengan judul “**Film Nicholas Saputra Bantu Kampanyekan Isu Lingkungan.**” Peneliti dari Institute for Essential Services Reform (IESR) yang dikutip dalam artikel ini mengatakan bahwa dia yakin penting bagi lembaga think tank untuk menyampaikan temuannya mengenai energi terbarukan kepada publik. Implikasinya adalah bahwa penting meningkatkan kesadaran masyarakat tentang energi terbarukan dan laporan ilmiah terkait. Lebih lanjut dikatakan bahwa akademisi/aktivis dapat bekerja sama dengan industri kreatif untuk menyebarluaskan temuan ilmiahnya.

Di sisi lain, artikel yang diterbitkan oleh *Liputan6* menunjukkan fakta unik bagaimana media menyebutkan negara-negara lain selain Indonesia dalam kaitannya dengan tanggung jawab pengembangan energi terbarukan. Dengan judul yang menyatkan “**Laju Pertumbuhan ET di Indonesia Tertinggi di Dunia,**” artikel ini menyoroti tingkat pertumbuhan bahan bakar hayati (biofuel) yang tinggi di Indonesia di bawah program B-20 dan memandangnya sebagai pilar pengembangan energi terbarukan—meskipun bahan bakar hayati yang dihasilkan dari kelapa sawit belum tentu netral karbon, dan kapasitas tenaga surya dan angin yang terpasang di Indonesia masih termasuk yang terendah di kawasan ini. Tidak satu pun dari fakta ini yang disebutkan dalam artikel tersebut. Pada bagian akhir artikel dikatakan bahwa penurunan emisi karbon hanya bisa tercapai jika komunitas global mengembangkan lebih banyak kebijakan karbon netral, “seperti yang dilakukan Indonesia.”

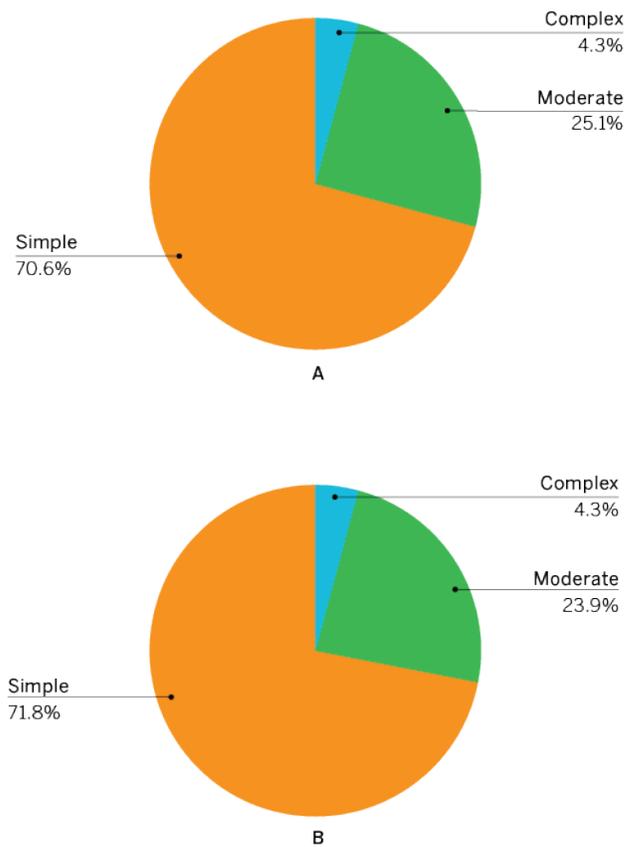
Secara umum, analisis pembedaan (frame) artikel energi terbarukan mengungkapkan bahwa media Indonesia mendorong pertumbuhan energi terbarukan lebih lanjut untuk melengkapi industri batu bara dan memastikan ketahanan energi serta membawa manfaat ekonomi. Meskipun narasinya positif, tidak ada artikel yang memandang energi terbarukan sebagai basis energi. Sebagian kecil artikel membahas hambatan yang menjadi kendala, seperti kebijakan yang tidak mendukung dan kurangnya kesadaran publik.

Setelah menyelesaikan analisis pembedaan (frame), saya kemudian beralih ke pembahasan kualitatif tentang seberapa baik cerita energi ditulis, menggunakan tiga parameter utama: kompleksitas artikel, literasi energi jurnalis, dan proses editorial.

Analisis Kualitatif: Kualitas Artikel

Jurnalis menulis cerita sederhana, melihat energi sebagai topik yang sulit untuk dijamah

Gambar 8. Kompleksitas cerita tentang batu bara (A) dan energi terbarukan (B)



Seperti yang terlihat pada gambar 8, sebagian besar cerita tentang energi disajikan dalam bentuk hard news yang ditulis dengan cara yang sederhana dengan panjang artikel kurang dari 500 kata. Jurnalis energi senior, Intan, dari *Republika* mengaitkan hal ini dengan sifat khas media online, yang membutuhkan keringkasan ekstrem. “Di media online, kami tidak dapat menulis artikel yang panjang karena itu mempengaruhi tampilan halaman dan klik. Tidak semua orang ingin membaca cerita yang panjang...dan tampilan halaman akan menentukan pendapatan”. Sementara itu, jurnalis dari *kompas.com*, Rully Ramli, mengatakan artikel

energinya harus “ramah pengguna. ... Sesuatu yang dapat dibaca oleh publik, tidak terlalu berfokus pada hal-hal teknis.”

Terkait literasi energi, sebagian besar jurnalis yang diwawancarai dalam penelitian ini mengaku tidak mudah menulis cerita energi, terutama bagi jurnalis energi junior yang baru satu atau dua tahun pertama bekerja. Jurnalis ANTARA, Afut Syafril Nursyirwan, mengatakan, “Energi adalah sektor yang sangat langka untuk dirotasi karena tidak banyak orang yang bisa menguasainya dan tidak banyak yang menginginkannya.” Nusyirwan, jurnalis senior, belum dirotasi karena belum ada pengganti yang cocok menempati posisinya saat ini. Demikian pula, jurnalis dari kumparan.com, Ema, mengatakan, “Energi rumit...memusingkan...hal-hal seperti menulis satuan per barel atau satuan gas.” Intan dari Republika menambahkan bahwa pada tahun pertama, dirinya mengalami kesulitan memahami istilah dan satuan energi.

Proses editorial: Hubungan yang fleksibel antara wartawan dan editor mereka

Hampir semua jurnalis yang diwawancarai mengatakan bahwa wartawan dapat bekerja tanpa banyak pengawasan editorial. Seperti yang dikatakan editor dari detikNews:

“Para jurnalis mendapatkan agenda tugas reportase; setibanya di lokasi acara, mereka memberikan informasi awal seperti siapa pembicara yang hadir pada kegiatan liputan. Dari situ, editor membantu memberikan arahan kepada wartawan, termasuk memberikan pertanyaan tambahan. Dalam proses penyuntingan berita, redaksi akan menanyakan kepada wartawan apakah informasi yang disampaikan sudah benar. ... Pada tahap ini, umumnya ada diskusi singkat antara wartawan dan editor untuk menentukan judul artikel yang akan disiarkan”.

Sebagian besar yang wartawan dan editor yang diwawancarai mengatakan bahwa wartawan dan editor bekerja secara kolaboratif, tetapi wartawan diberi kebebasan dalam menyajikan artikel energi sesuai ketertarikan pribadi. Editor Kompas.com Djumena, berkata, “wartawan menerima tugas dari editor, tetapi mereka tidak dilarang meliputi sesuai dengan preferensi pribadi.” Norman Joshua dari *The Jakarta Post* memberikan wawasan lebih lanjut: “Untuk media kecil, ada jurnalis yang langsung memposting berita tanpa melalui redaksi. Untuk media sedang, wartawan hanya melakukan pitch, satu hingga dua kalimat, dan editor hanya perlu menjawab ya atau tidak. Apabila medianya lebih besar, mereka dapat berdiskusi tentang sudut pandang dan siapa narasumbernya sebelum membuat cerita.”

Sebagai kesimpulan, studi saya tentang kualitas artikel menemukan bahwa sebagian besar jurnalis menggambarkan hubungan yang suportif, meskipun sedikit lepas tangan, antara editor dan wartawan. Kondisi seperti ini hanya berlaku untuk jurnalis dengan pengalaman bertahun-tahun dalam peliputan energi, tetapi jurnalis junior sering merasa topik ini sulit untuk dibahas. Lebih dari 70 persen cerita akhirnya menjadi artikel liputan disajikan sebagai hard news dengan sedikit tambahan nuansa.

STUDI KASUS LIPUTAN OMNIBUS LAW DAN UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN DI INDONESIA

Oleh Cherika Hardjakusumah | Climate Tracker Fellow

Pada 2 November 2020, Presiden Indonesia Joko Widodo menandatangani **RUU omnibus law** yang berisi serangkaian langkah deregulasi di semua sektor untuk mendorong investasi. Pembahasan RUU tersebut telah berlangsung sejak 2019, dan telah memicu debat publik karena alasan politik dan lingkungan/sosial.

Undang-undang ini mengalihkan kewenangan pemberian izin (untuk eksploitasi sumber daya alam seperti pertambangan dan kehutanan) dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Ini merupakan kemunduran yang signifikan dari upaya desentralisasi yang telah dikerjakan oleh pemerintahan sebelumnya. Undang-undang tersebut juga melunakkan konsekuensi bagi perusahaan yang melanggar aturan lingkungan dari pidana menjadi sanksi administratif.

Selain itu, pada 20 Mei 2020 parlemen mengesahkan versi revisi dari **UU pertambangan mineral dan batu bara** yang juga kontroversial karena kurangnya konsultasi publik dalam prosesnya. Penelitian saya berfokus pada artikel yang dipublikasikan di media online tentang kedua undang-undang tersebut.

Tren 1: Pembingkai paling umum

Analisis saya terhadap artikel berita yang diterbitkan oleh tiga outlet media—*Kompas*, *Tempo*, dan *Bisnis*—menunjukkan setidaknya lima kerangka umum yang digunakan saat menulis tentang omnibus law dan undang-undang minerba:

Omnibus law dan revisi undang-undang minerba dalam 16 artikel sebagai kebijakan dipandang hanya menguntungkan korporasi besar, bukan masyarakat. Terkait Undang-Undang minerba khususnya, pembingkai ini secara akurat mencerminkan kenyataan bahwa delapan perusahaan batu bara besar akan mendapatkan keuntungan besar dari ketentuan baru yang memungkinkan perpanjangan izin otomatis hingga 20 tahun, karena perusahaan-perusahaan ini memiliki izin yang sebelumnya ditetapkan akan berakhir dalam lima tahun ke depan.

Sembilan artikel berfokus pada parlemen yang mempercepat proses pengesahan undang-undang minerba, dan publik, yang diwakili oleh organisasi masyarakat sipil, mempertanyakan apakah keputusan ini telah sesuai dengan aturan dan prosedur yang tepat.

Delapan artikel berfokus pada kegagalan parlemen untuk melibatkan masyarakat sipil atau bahkan pejabat pemerintah dengan pengalaman yang relevan dalam konsultasi kedua rancangan undang-undang tersebut. Dalam artikel *Bisnis* pada November 2019, disebutkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak dilibatkan dalam konsultasi karena bukan mitra Komisi VII DPR. Sayangnya, penulis artikel ini tidak menanggapi permintaan wawancara saya untuk menjelaskan lebih lanjut.

Tujuh artikel berfokus pada pemilihan parlemen untuk membahas RUU yang kontroversial ketika perhatian publik telah dialihkan oleh pandemi COVID-19. Apabila ini rencananya, maka akan menjadi bumerang besar, sebab RUU Omnibus maupun RUU minerba menarik perhatian media dan menuai kritik keras dari masyarakat sipil.

Peralihan kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat diliput dalam empat artikel sebagai kemunduran bagi upaya desentralisasi dan mungkin ancaman bagi demokrasi.

Implikasi kedua undang-undang tersebut untuk masa depan energi dan lingkungan negara tidak digunakan sebagai pembedaan utama dalam satu pun dari ketiga outlet media yang dianalisis.

Tren 2: Elemen yang berkontribusi terhadap pembedaan

Karena sifat kontroversial dari RUU tersebut, artikel-artikel yang memuat pemberitaan terkait ditulis dengan judul berita yang provokatif. Contohnya:

- "Aktivis Menganggap UU Minerba Baru sebagai Kejahatan yang Disahkan" (*Tempo*, 1 Juni 2020)
- "UU Minerba Disahkan, YLBHI Melihat DPR Mengkhianati Konstitusi" (*Kompas*, 14 Mei 2020)
- "Pasal-pasal tentang Otoritas Daerah Telah Dihapus dari UU Minerba, Jatam Menilai Hal Ini Bakal Berujung Korupsi di Pemerintah Pusat" (*Kompas*, 12 Mei 2020)

Sebagian besar artikel sampel secara seimbang mengutip pernyataan pemerintah dan non-pemerintah. Namun demikian, tidak ada pernyataan dari pemangku kepentingan lokal/daerah, meskipun undang-undang jelas akan memengaruhi otoritas di tingkat ini. Dari pihak non-pemerintah, Jatam (Jaringan Advokasi

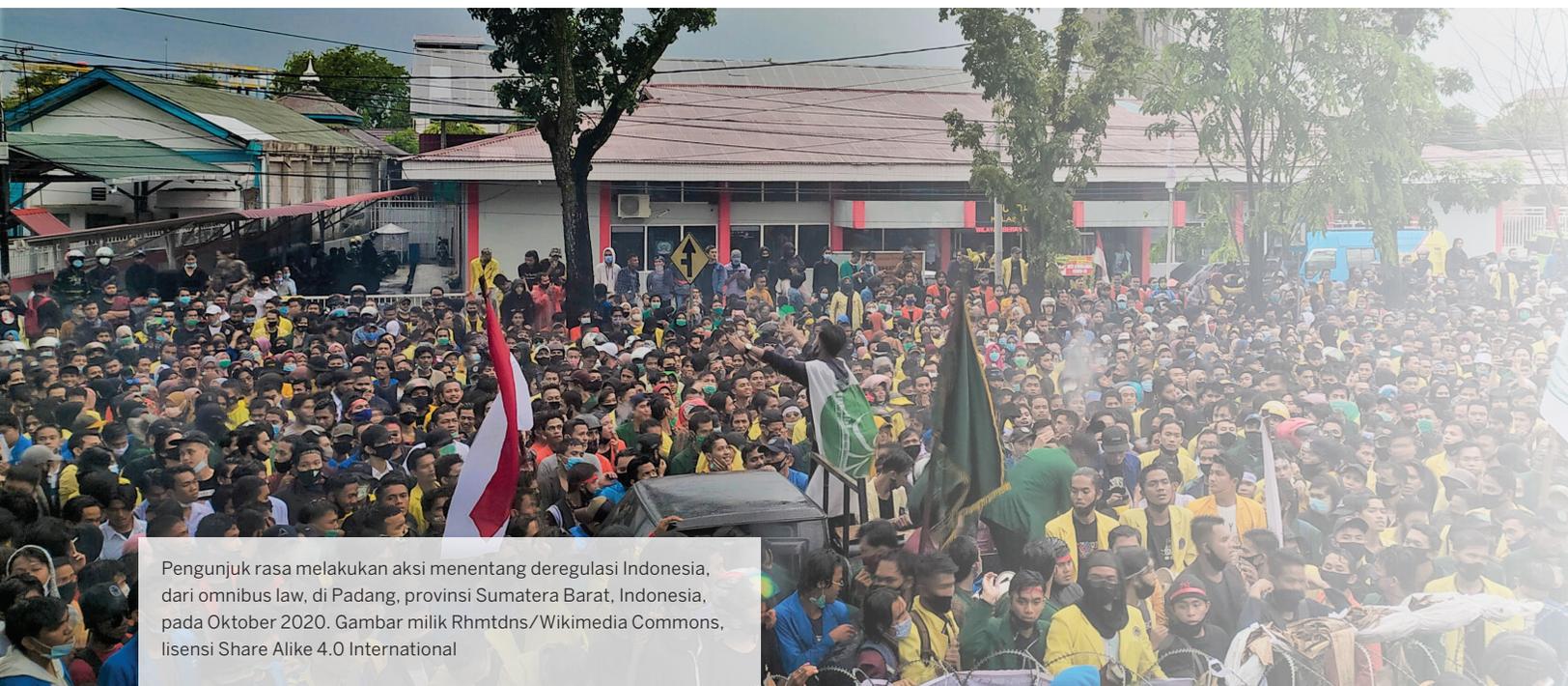
Pertambangan), yang merupakan wadah aktivis, paling banyak dikutip, meskipun organisasi advokasi lain juga dikutip, seperti Publish What You Pay (advokasi internasional) dan Indonesia Corruption Watch, maupun LSM lingkungan seperti Walhi, Greenpeace, dan lainnya.

Artikel-artikel yang dikaji minim dalam menyertakan pernyataan dari perusahaan dan lainnya di sektor swasta. Dalam sebuah wawancara, Aris Prasetyo dari *Kompas* membenarkan bahwa tidak seperti pejabat pemerintah dari kementerian yang umumnya terbuka untuk wawancara, hanya sedikit perusahaan yang bersedia melakukan wawancara media. Karena data pertambangan dan batu bara sensitif secara komersial, cukup sulit juga untuk mendapatkan data demi tujuan penelitian. Selain itu, jurnalis energi dari tabloid keuangan menggarisbawahi sulitnya mendapatkan narasumber dari parlemen. "Saat meliput tentang undang-undang batu bara, sangat sulit [mendapatkan] klarifikasi parlemen," tambahnya.

Majalah *Tempo* memang mewawancarai pejabat di dua perusahaan batu bara terkait masalah kontrak pertambangan batu bara. Salah satu perusahaan ini dimiliki oleh keluarga menteri BUMN saat ini. Informasi ini penulis letakkan di akhir artikel berjudul "Siapa Diuntungkan Pengesahan Revisi UU Minerba" (*Tempo*, 23 Mei 2020), yang mempertanyakan kepentingan politik dan bisnis di balik usulan undang-undang tersebut.

Tren 3: Kualitas

Artikel yang dianalisis berfokus pada undang-undang omnibus dan minerba dan tidak memberikan definisi mendalam tentang istilah atau konsep energi. Baik media online maupun media cetak sering menggunakan foto untuk mendukung artikel. *Kompas* memiliki tim infografis yang kuat, dan keputusan tentang visual yang akan digunakan dibuat dalam rapat editorial. Jenis infografis yang mereka terbitkan adalah, contohnya, tanggal penting dan



Pengunjuk rasa melakukan aksi menentang deregulasi Indonesia, dari omnibus law, di Padang, provinsi Sumatera Barat, Indonesia, pada Oktober 2020. Gambar milik Rhmtdns/Wikimedia Commons, lisensi Share Alike 4.0 International

peristiwa kronologis RUU, perubahan penting dalam undang-undang, serta visual dan grafik produksi batu bara.

Dalam hal kompleksitas artikel, media online secara konsisten kurang mendalam dalam analisis mereka dan memberikan lebih banyak berita tentang peristiwa yang terkait dengan undang-undang, termasuk liputan sesi sidang parlemen, sesi pertemuan rakyat, dan webinar. Seorang jurnalis senior menjelaskan bahwa begitulah sifat media online Indonesia, yang lebih mengutamakan kuantitas daripada kualitas. “Mereka harus mempublikasikan konten sebanyak-banyaknya, dan tidak terlalu memperdulikan analisis,” ujar jurnalis ini. Media cetak harian memiliki analisis yang sedikit lebih mendalam. Namun ketika media cetak harian (seperti *Kompas*) menawarkan versi e-paper, versi online hanya dapat diakses dengan langganan berbayar.

Dalam wawancara, Retno Sulistyawati dari *Tempo* membenarkan bahwa jurnalis harian yang ditugaskan untuk bekerja di kementerian tertentu memiliki akses yang baik ke narasumber resmi dalam jumpa pers atau wawancara langsung. Namun karena waktu yang terbatas, jurnalis harian memiliki lebih sedikit kesempatan untuk melakukan penelitian yang mendalam, tidak seperti majalah mingguan. Retno mengatakan, sebagai jurnalis yang bekerja di majalah mingguan, ia dapat menginvestasikan waktunya untuk diskusi informal dengan narasumber untuk mendapatkan lebih banyak informasi yang mendalam.

Tren 4: Bias/kepentingan/tantangan

Jurnalis senior dari outlet media internasional yang berbasis di Indonesia mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa “iklan biasanya menjadi penyebab utama bias dalam artikel. Perusahaan yang membayar untuk beriklan di media mungkin mendapatkan lebih sedikit kritik. Faktor kedua yang menyebabkan bias adalah kepemilikan media.” Namun demikian, dalam penelitian ini, tidak ada jurnalis yang diwawancarai yang mengakui adanya hubungan bisnis batu bara dengan pemilik media tempat mereka bekerja.

Faktor ketiga yang dapat menimbulkan bias adalah pandangan politik. Contohnya, *Kompas* sudah lama dikenal akan pendekatan nasionalis atau inward looking (bukan pengusung pro-liberalisme/pro-asing) dan giat menjaga netralitas dalam artikelnya, sedangkan *Tempo* lebih kritis, investigatif, dan lugas dalam pendekatannya. Pada tahun 1994, majalah tersebut diberedel oleh mantan presiden Soeharto karena terlalu kritis terhadap pemerintah. *Bisnis* cenderung lebih pro-investasi dan berorientasi bisnis.

Empat jurnalis yang diwawancarai memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun, dan satu orang juga merangkap editor. Jurnalis lain yang diwawancarai adalah wartawan energi dengan pengalaman dua tahun bekerja di tabloid keuangan. Di *Tempo*, semua jurnalis menjalani pelatihan yang ketat dan mendapatkan pengalaman bekerja di koran cetak dan edisi online selama bertahun-tahun. Setelah mereka mencapai tingkat senioritas tertentu, mereka dapat bergabung dengan tim majalah. Di majalah tersebut, para jurnalis senior ini bergilir dari satu redaksi ke redaksi lain. Semuanya diharapkan mahir menulis tentang topik yang berbeda.

Keuntungan dari sistem ini adalah memungkinkan jurnalis menghubungkan beragam isu menggunakan lensa yang berbeda saat meliput. Struktur ini juga mempengaruhi kedalaman dan kualitas artikel. Contohnya, dalam “Siapa Diuntungkan Pengesahan Revisi UU Mineral dan Batu Bara,” penulis menghubungkan rincian kronologis revisi undang-undang tersebut dan memberikan

konteks yang relevan. Selain itu, artikel tersebut juga menerbitkan surat yang diterbitkan dan diedarkan di parlemen (yang biasanya tidak tersedia untuk umum) yang memberikan perincian kontrak perusahaan yang akan segera berakhir.

Di *Kompas*, di sisi lain, “jurnalis akan ditempatkan di satu meja dan diharapkan bertahan di sana selama bertahun-tahun,” jelas Aris dari *Kompas*. Sistem ini menumbuhkan keahlian jurnalis dalam menulis tentang suatu masalah. Namun demikian, ruang bagi jurnalis lebih sedikit untuk terpapar isu-isu lain yang mungkin memiliki kaitan dengan masalah energi. Selain pertemuan editorial rutin, Aris dan Ichwan Susanto tidak menyebutkan mekanisme koordinasi lain untuk menyelaraskan pesan atau pembingkaiannya artikel yang membahas masalah serupa (mis., batu bara) di berbagai bagian (mis., ekonomi atau kemanusiaan). Jadi, misalnya, artikel yang ditulis oleh Susanto, “Celah Regulasi Picu Lubang Tambang,” atau “Regulatory Loopholes Trigger Ex-Mining Pits Issue,” yang membahas kebijakan reklamasi, hanya menyebutkan sekilas undang-undang batu bara dan omnibus, meskipun terkait erat dengan kebijakan reklamasi. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang lebih baik dengan jurnalis dari bagian lain dapat membantu memperkaya laporan dalam hal data dan analisis.

Penutup

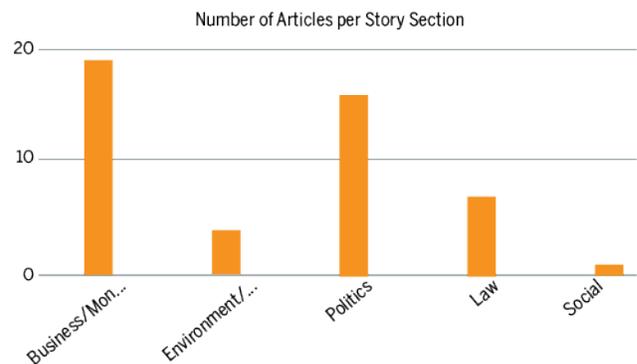
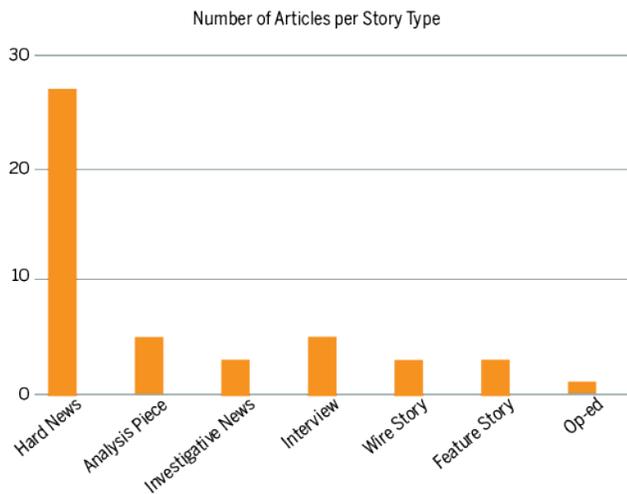
Tiga outlet media yang diteliti banyak meliput Undang-Undang Minerba dan Omnibus Law. Puncak liputannya pada tanggal 20 Mei 2020, bertepatan dengan rapat paripurna parlemen, dan artikel-artikel tersebut mencakup aspek bisnis dan politik dari undang-undang. Ada beberapa artikel yang memuat dampak sosial-lingkungan terkait, tetapi tidak ada yang membahas aspek ilmiah dari emisi karbon yang lebih tinggi secara konkret.



Cherika Hardjakusumah

Cherika Hardjakusumah adalah spesialis penelitian dan komunikasi dengan pengalaman lebih dari lima tahun dalam peran karier multi-faset di Eropa dan Asia. Dia menaruh minat besar pada masalah iklim dan energi dan telah mengerjakan berbagai proyek penelitian yang berkaitan dengan minyak sawit, bahan bakar hayati, dan energi matahari. Cherika ingin mempelajari lebih lanjut tentang akses energi dan pembangunan ekonomi rendah karbon yang menurutnya sangat relevan dengan negara asalnya, Indonesia. Selain mengerjakan masalah energi, dia kerap mendiskusikan interaksi budaya, keragaman, dan inklusi di saluran podcastnya.

Aneks



Kesimpulan

Analisis mendalam tentang batu bara dan pelaporan energi terbarukan di Indonesia mengungkapkan bahwa outlet media di Indonesia memandang batu bara sebagai pemain utama dalam masa depan energi negara. Terlepas dari beberapa artikel yang menyoroti dampak buruk batu bara di level internasional, tambang batu bara dan pembangkit listrik dalam negeri digambarkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari perekonomian negara. Energi terbarukan dipandang sebagai perkembangan positif, meskipun perannya dalam bauran energi adalah untuk menggantikan minyak/gas dan menambah batu bara alih-alih bertindak sebagai baseload power.

Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masuk dalam sepuluh besar negara di dunia yang terbukti memiliki cadangan batu bara. Indonesia juga satu-satunya negara yang dipelajari dalam analisis lima negara ini, di mana lebih banyak artikel yang memandang batu bara secara positif alih-alih negatif, dengan 67 persen dari semua sampel artikel batu bara menjelaskannya sebagai memainkan peran klasik dalam pertumbuhan ekonomi negara. Tidak ada artikel yang secara eksplisit menyerukan penghentian penggunaan batu bara, hanya sebatas menyerukan peraturan dan teknologi batu bara yang “lebih bersih”.

Satu-satunya cerita yang secara langsung mengulas dampak negatif batu bara bagi kehidupan masyarakat Indonesia adalah tentang penambangan batu bara—lebih spesifiknya kegiatan penambangan batu bara “ilegal”. Perbedaan antara penambangan “legal” dan “ilegal”, mengalihkan kesalahan pada ilegalitas sejumlah proyek pertambangan alih-alih bahaya yang melekat pada penambangan batu bara itu sendiri. Undang-undang omnibus dan minerba yang baru-baru ini disahkan menuai banyak kontroversi, dan juga dikritik karena proses konstitusi yang diragukan dan kurangnya transparansi alih-alih potensi dampak lingkungannya.

Energi terbarukan hanya diberitakan secara luas, karena sedang dalam tahap perkembangan yang baru dan belum menjadi konsep

yang dikenal baik oleh jurnalis atau pembaca Indonesia. Editor dari kompas.com, Erlangga Djumena, mengatakan energi terbarukan “memiliki sumber yang terbatas [untuk dikutip/diwawancarai oleh jurnalis], karena masih jarang. ... Bukan hanya pembaca, jurnalis terkadang bingung”. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa hampir setengah dari semua cerita energi terbarukan tidak secara khusus membahas teknologi apa pun, sedangkan yang benar-benar membahasnya, berfokus pada energi matahari atau bahan bakar nabati. Biodiesel, khususnya, menerima liputan positif pada umumnya dari outlet media arus utama, setelah pemerintah memberlakukan mandat undang-undang 20 persen bauran biodiesel. Meskipun menggambarkan biodiesel sebagai ramah lingkungan, artikel ini menutup mata terhadap fakta bahwa bahan bakar nabati di Indonesia dihasilkan dari perkebunan kelapa sawit, yang mengalihkan fungsi ekosistem hutan hujan yang sebelumnya menyerap karbon.

Kesimpulannya, semua media yang dijadikan sampel menghadapi beberapa tantangan serupa dalam pemberitaan energi mereka, termasuk kurangnya keragaman narasumber, dan jurnalis menganggap energi sebagai topik yang sulit untuk dibahas, seperti disebutkan di atas. Namun demikian, terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara perusahaan media besar di Indonesia dan outletnya yang lebih independen. Tiga dari tujuh outlet berita yang dianalisis—Okezone, detikNews, dan Sindonews—adalah milik dua korporasi yang memiliki saham di industri pertambangan batu bara. Okezone dan Sindonews bersama-sama menerbitkan 62,5 persen artikel yang menyoroti kontribusi ekonomi positif dari industri batu bara. Sementara itu, Kumparan, outlet online yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan media baru, memuat artikel yang paling banyak memuji manfaat energi terbarukan (35) dan paling sedikit artikel yang memuji batu bara (enam). Terlepas dari struktur editorial, jurnalis mengatakan mereka akan merasa lebih percaya diri untuk menulis berita soal energi secara kritis dengan pengetahuan yang lebih mendalam tentang masalah tersebut dan dengan dukungan keuangan dari sumber non-korporasi.

Penelitian untuk laporan ini dilakukan di bawah bimbingan Climate Tracker, sebuah jaringan yang terdiri dari 12.000+ jurnalis iklim muda di seluruh dunia. Laporan ini adalah bagian dari analisis media regional yang disiapkan oleh Stanley Center for Peace and Security dan dibuat oleh Climate Tracker.



Tentang Kami

Stanley Center for Peace and Security bermitra dengan orang-orang, organisasi, serta komunitas global yang lebih besar untuk mendorong kemajuan kebijakan di tiga bidang masalah—menanggulangi perubahan iklim, menghindari penggunaan senjata nuklir, serta mencegah kekerasan dan kekejaman massal. Pusat ini didirikan pada tahun 1956 dan mempertahankan kemandiriannya sembari mengembangkan forum yang menaungi beragam perspektif dan gagasan. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang publikasi terbaru kami dan acara mendatang, kunjungilah stanleycenter.org.



Tentang Climate Tracker

Climate Tracker adalah proyek jurnalisme iklim berbasis kaum muda terbesar di dunia. Kami melatih dan secara kompetitif memberdayakan kaum muda di seluruh dunia untuk memengaruhi debat nasional mereka tentang perubahan iklim, dan memublikasikan gagasan mereka di media nasional. Kami mengirim orang-orang muda yang paling kompeten ke konferensi internasional di mana mereka dapat secara langsung memengaruhi pembuat keputusan serta mendapatkan pengalaman langsung dalam menyusun kebijakan nasional dan internasional. ClimateTracker.org.